

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi pemerintah yang bertugas menangani masalah penanaman modal yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan bertugas untuk melayani ijin penelitian dan ijin usaha.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan prosedur Permendagri Nomer 13 Tahun 2006.
2. Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dapat menjadi contoh bagi dinas pemerintahan agar menggunakan sistem baru yang terintegrasi.
3. Fungsi anggaran bagi pemerintah mempunyai peran masing-masing untuk menjadikan intansi pemerintah yang baik dan benar.
4. Tahapan-tahapan dalam siklus anggaran dapat mematangkan kestabilan untuk tahun berikutnya.
5. Proses penyusunan anggaran daerah memuat beberapa faktor yaitu pokok-pokok kebijakan anggaran, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, serta teknis penyusunan APBD.
6. Untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD menggunakan dokumen pendukung ialah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang telah ditetapkan, selanjutnya

pemerintah daerah melalui SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

7. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem *Government Resources Management System* (GRMS) yaitu Aplikasi *E-Budgeting* untuk mempermudah Penyusunannya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat bagi peningkatan Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Meningkatkan SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan agar seluruh pekerjaan yang bersifat baru seperti sistem aplikasi *e-budgeting* ini dapat diselesaikan tepat waktu untuk mengurangi kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
2. Apabila adanya perputaran jabatan, maka perlu diadakan pelatihan 1-2 bulan sebelumnya agar mempermudah pegawai menyelesaikan tugas yang diberikan.
3. Penyusunan staf dan tanggung jawab perbidang agar dibenahi dan dikaji dengan benar karena banyak karyawan atau pegawai yang mempunyai tugas yang dirangkap dan ada juga yang kurang menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haryanto dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://dpmptsp.jatengprov.go.id/>. 2017. Diunduh Rabu, 15 Februari 2017.
- <http://e-budgeting.jatengprov.go.id/>. 2017. Diunduh Jum'at, 24 Februari 2017.
- <https://grms.jatengprov.go.id/>. 2017. Diunduh Rabu, 15 Februari 2017.
- https://ebudgeting.surabaya.go.id/new_portal/pedomanapbd/. 2017. Diunduh Sabtu, 10 Juli 2017
- https://www.academia.edu/28362826/PEDOMAN_PENYUSUNAN_RKA-SKPD_RKA_PPKD/. 2017. Diunduh Kamis, 8 Juli 2107
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moh. Mahsum dkk. 2013. *Akuntansi Sector Public*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Gubernur Jawa Tengah. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah*.